



RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Teratai No.10 Way Mengaku Liwa 34812
Telp. (078) 21144, Fax. (0728) 21144



PELAYANAN ONLINE
PEMBUATAN REKOMENDASI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR (KIR)
DAN
PEMBUATAN REKOMENDASI IZIN TRAYEK ANDES

LAYANAN MELALUI WhatsApp

- 0812-7318-8860
EDI SYAHMUDIN
Rekomendasi KIR
- 0812-9877-3551
FRENTY ABRINA
Rekomendasi KIR
- 0822-8116-8811
WENDI SATRIA, S.H
Rekomendasi Trayek




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dapat menyusun Rencana Awal Renja (RANWAL) Tahun 2025 ini.

Berdasarkan Pasal 126 ayat 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perangkat daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL) Tahun 2025 di susun dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju, yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja Tahun 2025 berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Demikian Rancangan Awal Kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun, seraya mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat berikutnya.

Liwa, 8 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat



REZA MAHENDRA, SH.M.H.

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DATAR ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5 Penelaahan Usulan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Masyarakat	15
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	23
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	24
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V. PENUTUP	49
LAMPIRAN I	50
LAMPIRAN II	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sedangkan Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja (Renja) harus mengalami penyesuaian dan beberapa perubahan.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perangkat Daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung



Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perhubungan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang perhubungan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif empat tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* di Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2023-2026. RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Lampung Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Barat dengan setidaknya dapat menjawab empat pertanyaan dasar (1) kemana Kabupaten Lampung Barat akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam empat tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai (4) bagaimana mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2023-2026.

Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) juga merupakan salah satu komponen dari sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Tahun 2025 merupakan tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Perhubungan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA).

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

18. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan pasal 16 huruf b bahwa Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 3 huruf b disusun dengan tahapan sebagai berikut a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan; d) pelaksanaan Musrenbang; e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan.

Sedangkan tujuan Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat, sebagai berikut:

- a. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan dengan RPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026;
- b. Memastikan bahwa rumusan kegiatan dan sub kegiatan alternatif dan/atau kegiatan, sub kegiatan baru yang disusun, dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran RPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :



BAB I : PENDAHULUAN

1. 1.1 Latar Belakang
2. 1.2 Landasan Hukum
3. 1.3 Maksud dan Tujuan
4. 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
3. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
4. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
5. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
2. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
3. 3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V : PENUTUP.

Lampiran I

Lampiran II

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 (dua) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 13 (Tiga Belas) kegiatan serta jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.024.066.184, terealisasi sebesar Rp. 2.905.338.089 atau 96,07%.

Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 100 persen.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub Bab ini merupakan Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas perhubungan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat terlaksana dengan baik, demikian juga sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Capaian kinerja yang tinggi akan menunjukkan telah terlaksananya kegiatan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan/ditargetkan. Tetapi penetapan target capaian kinerja untuk tahun mendatang masih perlu adanya peningkatan.

Pencapaian kinerja pelayanan urusan perhubungan secara garis besar didukung oleh adanya penggunaan SDM yang optimal, sarana dan prasarana pendukung yang menunjang serta perencanaan kegiatan yang baik sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja yang maksimal. Selain itu keterlibatan pihak luar seperti stakeholders dan

seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan yang berguna demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat sebagai satuan kerja yang melaksanakan urusan bidang perhubungan dalam melaksanakan kinerjanya berpedoman kepada dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Juga Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan

Bahwa untuk urusan pemerintahan bidang perhubungan telah ditetapkan ketentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang perhubungan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut cakupan pelayanan minimal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perhubungan tingkat kabupaten adalah meliputi pelayanan angkutan jalan, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, dan angkutan laut. Namun demikian mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Lampung Barat, potensi yang ada adalah potensi pelayanan angkutan jalan dan sebagian kecil potensi pelayanan angkutan danau. Dengan demikian penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat hanya fokus untuk pelayanan angkutan jalan/darat.

Adapun target indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang perhubungan yang akan dicapai beserta perkiraan waktu capaiannya adalah sebagai berikut:

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, beberapa Isu penting yang bersifat strategis dan masalah-masalah mendesak yang memerlukan penyelesaian diantaranya :

a. Isu-isu penting

1. Kebutuhan pelayanan transportasi untuk mobilitas orang dan barang terus meningkat.
2. Sistem transportasi yang optimal sangat membutuhkan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang berkualitas.

b. Masalah mendesak

Masalah mendesak dibidang urusan Perhubungan:

- a. Masih minimnya fasilitas rambu-rambu lalu-lintas dan kelengkapan jalan untuk mendukung keselamatan transportasi darat.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di terminal.
- c. Masih terbatasnya fasilitas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
- d. Masih minimnya Sumber Daya Manusia bidang perhubungan.

Terkait dengan tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah, sangat berkaitan dengan masalah-masalah mendesak tersebut sehingga berpengaruh terhadap hasil evaluasi perangkat daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat berada pada posisi yang cukup memuaskan dengan perolehan nilai 80,16 dengan predikat Sangat Baik.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dalam perumusan, penentuan dan pelaksanaan kebijakan program, kegiatan sub kegiatan di bidang perhubungan sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi secara faktual, perlu memetakan atau mengidentifikasi berbagai permasalahan guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

Permasalahan bidang perhubungan di Kabupaten Lampung Barat dapat di Identifikasikan, sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),

- manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen parkir, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga pengujian kendaraan bermotor dan lain lain.
- 2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - 3) Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal;
 - 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan belum terakreditasi sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) disebabkan terutama belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang disyaratkan;
 - 5) Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas jalan yang menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
 - 6) Belum terkelolanya secara maksimal potensi objek pendapatan daerah antara lain dari sektor parkir, trayek dan lain sebagainya;
 - 7) Kurangnya angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;
 - 8) Rendahnya minat masyarakat membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
 - 9) Tingginya minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi terutama bagi pelajar SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA;
 - 10) Belum adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
 - 11) Belum terlaksananya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
 - 12) Masih kurangnya disiplin dan pengetahuan berlalu lintas pengguna jalan;

Selain masalah-masalah yang terkait dengan bidang perhubungan tersebut, terdapat pula permasalahan yang tidak terkait langsung dengan perhubungan yaitu adanya PMK 212 untuk penanganan stunting, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Stunting tersebut. Imbasnya adalah berkurangnya anggaran untuk merealisasikan target capaian Renja yang telah ditetapkan.

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, permasalahan-permasalahan tersebut, baik yang terkait dengan bidang perhubungan maupun tidak, tentu sangat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, termasuk dampak terhadap pencapaian program nasional.

Dampak terhadap pencapaian program nasional sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan **Visi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, dan dalam sektor transportasi yaitu dengan **“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**, juga akan mengalami perlambatan.

Perlambatan pencapaian visi dan misi daerah dan nasional itu tentu juga akan berdampak pada rendahnya pencapaian indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Belum terwujudnya konektivitas nasional yang handal juga akan mengakibatkan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa tertinggal dan wilayah terpencil, sehingga rawan menimbulkan kesenjangan pemerataan pembangunan.

Terkait dengan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, bahwa berdasarkan telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif empat tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perangkat Daerah (RPD PD) 2023-2026, juga berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan empat tahun ke depan, antara lain sebagai berikut:

1. Posisi geostrategis; Lampung Barat dilalui oleh ruas jalan nasional yang berfungsi sebagai penghubung (feeder) antara koridor barat dengan koridor tengah lintas sumatera, dan dilalui pula oleh ruas jalan provinsi yang menghubungkan Liwa (Lampung Barat) – Muara Dua (OKU Selatan).

2. Kondisi geografis dan system konektivitas yang terbangun tersebut, menjadikan Lampung Barat memiliki nilai strategis bagi Propinsi Lampung.
3. Potensi pengembangan wilayah; Rencana struktur ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun 2030 dari enam 6 (enam) struktur ruang di antaranya adalah sistem jaringan prasarana transportasi, sistem jaringan prasarana energi, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya.
Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:
 - 1) Pengembangan Jaringan Jalan:
 - a. Jaringan jalan nasional yang melalui Kecamatan Sumber Jaya melintasi Tugusari, Fajar Bulan, Bakhu, Kenali, Pekon Balak dan Liwa.
 - b. Jaringan jalan provinsi yang menghubungkan Liwa – Batas Provinsi Sumatera Selatan dan antara Sukabumi dan Suoh.
 - c. Jaringan jalan kabupaten terdiri dari 161 Ruas jalan dengan panjang total 724 Km. Jalan umum yang akan menjadi jalan lingkar Kota Liwa di bagian Utara, dan Jalan Umum yang menghubungkan IKK Sekincau – IKK Basungan – IKK Banjit.
 - d. Peningkatan fungsi dan status jaringan jalan Nasional (Liwa-Padang Tambak-Bukit Kemuning) dan Propinsi (Sp Sukarno-Batas OKUS dan Ruas Pekon Balak-Suoh).
 - 2) Pengembangan Terminal:
 - a) Terminal Tipe B di Kota Liwa; bersifat penyempurnaan.
 - b) Terminal Tipe C untuk Fajar Bulan; bersifat penyempurnaan.
 - c) Terminal Tipe C untuk Sumber Agung, Kenali, dan Tugu Sari; bersifat pengembangan.
 - 3) Pengembangan Angkutan Umum:
 - a. Peningkatan kualitas moda angkutan umum sesuai dengan standar.
 - b. Pengembangan halte.
 - c. Pengintegrasian masing-masing trayek dan halte sehingga menjangkau keseluruhan wilayah pedesaan.
 - 4) Pengembangan Pelabuhan:
Pelabuhan di Kabupaten Lampung Barat yang dimaksud adalah pelabuhan penyeberangan Danau Ranau yang terdapat di Desa/Pekon Lumbok, Kecamatan Lumbok Seminung. Pelabuhan

tersebut merupakan pelabuhan lokal yang melayani angkutan penumpang dan barang secara terbatas yang difungsikan hanya untuk menyeberangi Danau Ranau menuju daerah sekitarnya.

4. Peningkatan aksesibilitas daerah untuk mengatasi hambatan mobilitas karena aksesibilitas erat kaitannya dengan jumlah dan kualitas jaringan jalan dan moda transportasi. Semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan suatu daerah, semakin mudah pula daerah tersebut terkoneksi dengan daerah lainnya.
5. Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017, Pendapatan Pos Dana Perimbangan merupakan pos pendapatan dengan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 76,36 persen. Sementara itu, pos PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 5,54 persen. Untuk pos Lain-Lain Pendapatan Daerah memberikan kontribusi sebesar 18,10 persen.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2024 sebagai berikut : Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 mengakomodir program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan dan LSM. Proses untuk memperoleh usulan tersebut adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Adapun usulan kegiatan dari masyarakat/pemangku kepentingan tersebut memang memiliki kesesuaian dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan.

Tabel 01

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025,
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Pembangunan Halte	Kec. Kebun Tebu, Sekincau	Jumlah Halte		
2	Pengadaan Marka Jalan	Kec. Kebun Tebu	Jumlah/Panjang Marka jalan		
3	Pengadaan Rambu-Rambu lalu lintas/jalan	Kec. Kebun Tebu, Sekincau, Lumbok Semining	Jumlah rambu-rambu lalu lintas		
4	Pengadaan Pita Pengaduh/Pita Kejut	Kec. Kebun Tebu, Sumber Jaya	Jumlah Pita Pengaduh		
5	Pengadaan LPJU	Kec. Suoh	Jumlah LPJU terpasang		Dianggarkan melalui APBD Provinsi Lampung



Tabel 02
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TUJUAN					TUJUAN					
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Kab. Lampung Barat	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	75 %	4.863.120.830	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Kab. Lampung Barat	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	75 %	4.863.120.830	
	SASARAN					SASARAN					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Kab. Lampung Barat	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	75 %	4.863.120.830	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Kab. Lampung Barat	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	75 %	4.863.120.830	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				4.863.120.830	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				4.863.120.830	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				4.863.120.830	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				4.863.120.830	



A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balik Bukit	Nilai SAKIP OPD	80.66 Point	3.429.120.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balik Bukit	Nilai SAKIP OPD	80.66 Point	3.429.120.100
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	19.930.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	19.930.000
		Balik Bukit	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	19 dokumen	23.255.000		Balik Bukit	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	19 dokumen	23.255.000
		Balik Bukit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	20.614.000		Balik Bukit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	20.614.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	19.930.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	19.930.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.250.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	4.360.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	4.360.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.450.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.450.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	4.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	4.275.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.920.000



7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	20.614.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	20.614.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	2.214.549.900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	2.214.549.900	
		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.465.000		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.465.000	
		Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.600.000		Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.600.000	
		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2.030.000		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2.030.000	
		Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.978.000		Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.978.000	
		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.295.000		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.295.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balik Bukit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	2.214.549.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balik Bukit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	2.214.549.900	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	2.465.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	2.465.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.600.000	



4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2.030.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2.030.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.978.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.978.000	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.295.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.295.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.785.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.785.000	
		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	7.425.000		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	7.425.000	
		Balik Bukit	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.510.000		Balik Bukit	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.510.000	
		Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.905.000		Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.905.000	
		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	3.713.000		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	3.713.000	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balik Bukit	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.785.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balik Bukit	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.785.000	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	7.425.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	7.425.000	



3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.510.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.510.000	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1.905.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1.905.000	
5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	3.713.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	3.713.000	
		Balik Bukit					Balik Bukit				
IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.903.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.903.000	
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balik Bukit	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	2.903.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balik Bukit	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	2.903.000	
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	62.601.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	62.601.000	
		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	7.574.000		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	7.574.000	
		Balik Bukit	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	132.256.000		Balik Bukit	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	132.256.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Balik Bukit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	62.601.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Balik Bukit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	62.601.000	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	7.574.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	7.574.000	



3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balik Bukit	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	132.256.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balik Bukit	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	132.256.000	
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.466.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.466.000	
		Balik Bukit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	69.250.000		Balik Bukit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	69.250.000	
		Balik Bukit	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	39.090.000		Balik Bukit	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	39.090.000	
		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	25.040.000		Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	25.040.000	
		Balik Bukit	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.605.000		Balik Bukit	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.605.000	
		Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.149.000		Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.149.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balik Bukit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.466.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balik Bukit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.466.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balik Bukit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	69.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balik Bukit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	69.250.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balik Bukit	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	39.090.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balik Bukit	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	39.090.000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	25.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	25.040.000	



5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Balik Bukit	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.605.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Balik Bukit	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.605.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.149.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.149.000	
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	24 unit	25.200.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahat Daerah	Balik Bukit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	24 unit	25.200.000	
1	Pengadaan Alat Besar	Balik Bukit	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Alat Besar	Balik Bukit	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	-	
2	Pengadaan Mebel	Balik Bukit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	25.200.000	Pengadaan Mebel	Balik Bukit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	25.200.000	
		Balik Bukit					Balik Bukit				
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	28.826.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	28.826.000	
		Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 laporan	67.610.000		Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 laporan	67.610.000	
		Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	99.257.600		Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	99.257.600	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	28.826.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	28.826.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 laporan	67.610.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 laporan	67.610.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	99.257.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	99.257.600	



IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balik Bukit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	16	0	378.021.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balik Bukit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	16	0	378.021.600	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balik Bukit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	unit	112.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balik Bukit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	unit	112.600.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balik Bukit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	13.485.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balik Bukit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	13.485.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balik Bukit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	251.936.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balik Bukit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	251.936.600	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Lampung Barat	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	12	%	1.407.263.330	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Lampung Barat	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	12	%	1.407.263.330	
		Lampung Barat	Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	3	%			Lampung Barat	Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	3	%		
		Lampung Barat	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	96	%			Lampung Barat	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	96	%		
I	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	105	Unit	310.758.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	105	Unit	310.758.000	
		Lampung Barat	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	Unit	-		Lampung Barat	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	Unit	-	
		Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	75	Unit	31.704.000		Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	75	Unit	31.704.000	



1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Unit	66.953.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Unit	66.953.000	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	105	Unit	310.758.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	105	Unit	310.758.000	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Lampung Barat	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	Unit	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Lampung Barat	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	Unit	-	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	75	Unit	31.704.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	75	Unit	31.704.000	
II	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Revitalisasi	0	Unit	-	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Revitalisasi	0	Unit	-	
		Lampung Barat	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	28.500.000		Lampung Barat	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	28.500.000	
		Lampung Barat	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	12.563.050		Lampung Barat	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	12.563.050	
1	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Revitalisasi	0	Unit	-	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Revitalisasi	0	Unit	-	
2	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C	Lampung Barat	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	28.500.000	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C	Lampung Barat	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	28.500.000	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Lampung Barat	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	12.563.050	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Lampung Barat	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	12.563.050	



III	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Lampung Barat	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	Dokumen	-	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Lampung Barat	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	Dokumen	-	
		Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	115.154.000		Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	115.154.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Lampung Barat	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	Dokumen	-	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Lampung Barat	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	Dokumen	-	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	115.154.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	115.154.000	
IV	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	Unit	604.232.280	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	Unit	604.232.280	



		Lampung Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	Orang	-		Lampung Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	Orang	-	
		Lampung Barat	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-	Unit	-		Lampung Barat	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-	Unit	-	
		Lampung Barat	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	Dokumen	-		Lampung Barat	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	Dokumen	-	
		Lampung Barat	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	Laporan	-		Lampung Barat	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	Laporan	-	
		Lampung Barat	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2	Laporan	33.346.000		Lampung Barat	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2	Laporan	33.346.000	
		Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	Unit	85.590.000		Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	Unit	85.590.000	
		Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	Laporan	-		Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	Laporan	-	
		Lampung Barat	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	Laporan	-		Lampung Barat	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	Laporan	-	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	Unit	604.232.280	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	Unit	604.232.280	



2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	Orang	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	Orang	-	
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0	Unit	-	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0	Unit	-	
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0	Dokumen	-	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0	Dokumen	-	
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Laporan	-	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Laporan	-	
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Lampung Barat	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2	Laporan	33.346.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Lampung Barat	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2	Laporan	33.346.000	
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	Unit	85.590.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	Unit	85.590.000	
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Laporan	-	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Laporan	-	
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Laporan	-	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lampung Barat	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Laporan	-	
V	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	100	%	162.786.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	100	%	162.786.000	



1	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	20.124.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	20.124.000	
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	Laporan	15.614.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	Laporan	15.614.000	
3	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	10	Unit	37.700.000	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Lampung Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	10	Unit	37.700.000	
4	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	Laporan	89.348.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	Laporan	89.348.000	
VI	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	-	Dokumen	-	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	-	Dokumen	-	
		Lampung Barat	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	Orang	-		Lampung Barat	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	Orang	-	
		Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	Laporan	-		Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	Laporan	-	
		Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	Laporan	-		Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	Laporan	-	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Lampung Barat	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	-	Laporan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Lampung Barat	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	-	Laporan	-	



2	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Lampung Barat	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	Laporan	-	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Lampung Barat	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	Laporan	-
3	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Persetujuan Teknis Andalalin	Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	Dokumen	-	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Persetujuan Teknis Andalalin	Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	Dokumen	-
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	Orang	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Lampung Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	Orang	-
VII	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	22.630.000	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	22.630.000
1	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	22.630.000	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	22.630.000
C	PENGELOLAAN PELAYARAN	Lampung Barat	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	10	%	25.953.400	PENGELOLAAN PELAYARAN	Lampung Barat	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	10	%	25.953.400
I	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Lampung Barat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	-	Unit	-	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Lampung Barat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	-	Unit	-
		Lampung Barat	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	-	Unit	-		Lampung Barat	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	-	Unit	-
		Lampung Barat	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	2	Unit	25.953.400		Lampung Barat	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	2	Unit	25.953.400



1	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Lampung Barat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	0	Unit	-	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Lampung Barat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	0	Unit	-		
2	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Lampung Barat	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	0	Unit	-	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Lampung Barat	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	0	Unit	-		
3	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Lampung Barat	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	2	Unit	25.953.400	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Lampung Barat	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	2	Unit	25.953.400		
TOTAL						4.863.120.830	TOTAL						4.863.120.830	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan sasaran semakin kuatnya kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan agar terciptanya pelayanan prima dibidang perhubungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)/Renstra, yakni pencapaian target keberhasilan selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan dari Tahun 2023 s/d 2026. Namun tujuan Rencana Kerja ini lebih mengarah pada periode 3 (tiga) Tahun Anggaran (Tahun 2025), yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah.

Sasaran yang ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (OPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan.

Tabel 02
Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Target 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	13 %

			Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	3%
			Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	98%
			Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	15%

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perhubungan adalah :

1. Meningkatnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.
2. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman tertib dan terkendali
3. Meningkatkan intensitas pelayanan jasa perhubungan dan keselamatan berlalu lintas.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Lampung Barat, maka kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan terjangkau.
2. Mewujudkan pelayanan transportasi bagi masyarakat yang lancar, tertib, aman dan nyaman.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur perhubungan guna memberikan pelayanan jasa perhubungan kepada masyarakat.

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan;

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik;
4. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

a. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Terkait dengan pencapaian SDGs, dan searah dengan Misi 1 pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan juga sejalan dengan Tujuan ke 9 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu “ **Membangun infrastruktur yang tangguh, peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.**”

Tujuan 9 dari pembangunan berkelanjutan ini mengandung tiga aspek penting yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

Adapun Target pertama dari tujuan ke 9 ini adalah Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Indikatornya yaitu Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak. Indikator ini dihitung untuk mengetahui jumlah penduduk yang tinggal berada di dalam jarak paling jauh 2 km dari jalan yang kondisinya layak. Ini untuk mengetahui akses penduduk terhadap jalan (prasarana transportasi) yang layak.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 menegaskan tiga peran jalan, yaitu : 1. Sebagai bagian dari prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan dan lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2. Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat bangsa dan negara; 3. Sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menurut statusnya, jalan dibagi berdasarkan pembinaannya yaitu jalan nasional, jalan provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan

Jalan Desa. Jalan Nasional itu sendiri merupakan jalan Arteri dan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Jalan ini menghubungkan ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Tanggung jawab pembinaannya berada pada Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Terkait dengan pengentasan kemiskinan, program-program Dinas Perhubungan juga sejalan dengan Target dari Tujuan ke 9 tersebut, utamanya adalah *...untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia...* Dengan meningkatnya pembangunan disektor perhubungan, terutama penyediaan sarana dan prasarananya, maka akan memperluas akses masyarakat dalam menjalankan usaha, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan demikian akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan.

Dalam hal pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah berupaya untuk merealisasikannya. Misalnya dalam hal pemberian Rekomendasi Uji Kir kendaraan bermotor angkutan umum yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedurnya. Dinas Perhubungan juga sudah membuat semacam Maklumat Dinas Perhubungan yaitu :

1. Memberikan pelayanan prima dan mengutamakan kepuasan sebagai prioritas kami.
2. Memberikan pelayanan secara ramah, bertanggung jawab, mudah dan transparan.
3. Menjadikan sistem transportasi yang handal dan terjangkau.

Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
3. Program Pengelolaan Pelayanan

Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-program tersebut adalah :



No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai



			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahat Daerah	Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang
			Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C



			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas



			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Persetujuan Teknis Andalalin
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau
			Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
			Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
Jlh	3 Program	17 Kegiatan	70 Sub Kegiatan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025, Dinas Perhubungan akan menyelenggarakan 3 (dua) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 70 (tujuh puluh) Sub Kegiatan.



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Nama PD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	7	8	9	10	15	16
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			4.863.120.830				7.198.206.566
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			4.863.120.830				7.198.206.566
2.15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	81.45 Point	3.429.904.100	Balik Bukit	DAU	82.24 Point	5.060.093.888
X XX 01 2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	19.930.000	Balik Bukit	DAU	13 dokumen	32.058.275
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	19 dokumen	23.255.000	Balik Bukit	DAU	19 dokumen	39.226.680



		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	20.614.000	Balik Bukit	DAU	16 dokumen	35.623.017
X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	19.930.000	Balik Bukit	DAU	13 dokumen	32.058.275
X XX 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.250.000	Balik Bukit	DAU	2 dokumen	6.655.000
X XX 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	4.360.000	Balik Bukit	DAU	2 dokumen	5.382.963
X XX 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.450.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	6.778.783
X XX 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	4.275.000	Balik Bukit	DAU	2 dokumen	11.683.518
X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.920.000	Balik Bukit	DAU	12 Laporan	8.726.416
X XX 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	20.614.000	Balik Bukit	DAU	16 Laporan	35.623.017
X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	2.214.549.900	Balik Bukit	DAU	25 orang/bulan	3.398.751.254



		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	2.465.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	1.331.000
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.600.000	Balik Bukit	DAU	1 Laporan	4.172.685
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2.030.000	Balik Bukit	DAU	2 dokumen	1.331.000
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.978.000	Balik Bukit	DAU	18 laporan	3.133.936
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.295.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	3.133.936
X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	2.214.549.900	Balik Bukit	DAU	25 orang/bulan	3.398.751.254
X XX 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	2.465.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	1.331.000



X XX 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.600.000	Balik Bukit	DAU	1 Laporan	4.172.685
X XX 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2.030.000	Balik Bukit	DAU	2 dokumen	1.331.000
X XX 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.978.000	Balik Bukit	DAU	18 laporan	3.133.936
X XX 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.295.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	3.133.936
X XX 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.785.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	1.331.000
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	7.425.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	7.331.000
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.510.000	Balik Bukit	DAU	12 Laporan	1.331.000
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.905.000	Balik Bukit	DAU	1 Laporan	1.996.500
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	3.713.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	3.993.000



X XX 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.785.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	1.331.000
X XX 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	7.425.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	7.331.000
X XX 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.510.000	Balik Bukit	DAU	12 laporan	1.331.000
X XX 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1.905.000	Balik Bukit	DAU	1 laporan	1.996.500
X XX 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	3.713.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	3.993.000
X XX 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.903.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	3.327.500
X XX 01 2.04 01	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	2.903.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	3.327.500
X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	62.601.000	Balik Bukit	DAU	1 paket	-
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	7.574.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	11.192.379



		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	132.256.000	Balik Bukit	DAU	5 orang	128.784.898
X XX 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	62.601.000	Balik Bukit	DAU	1 paket	-
X XX 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	7.574.000	Balik Bukit	DAU	1 dokumen	11.192.379
X XX 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	132.256.000	Balik Bukit	DAU	5 orang	128.784.898
X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.466.000	Balik Bukit	DAU	1 paket	10.992.729
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	69.250.000	Balik Bukit	DAU	1 paket	55.902.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	39.090.000	Balik Bukit	DAU	1 paket	62.905.057
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	25.040.000	Balik Bukit	DAU	2 dokumen	33.408.100
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.605.000	Balik Bukit	DAU	12 Laporan	6.316.926



		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.149.000	Balik Bukit	DAU	12 Laporan	251.680.000
X XX 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.466.000	Balik Bukit	DAU	1 paket	10.992.729
X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	69.250.000	Balik Bukit	DAU	1 paket	55.902.000
X XX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	39.090.000	Balik Bukit	DAU	1 paket	62.905.057
X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 dokumen	25.040.000	Balik Bukit	DAU	4 dokumen	33.408.100
X XX 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.605.000	Balik Bukit	DAU	12 Laporan	6.316.926
X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.149.000	Balik Bukit	DAU	12 Laporan	251.680.000
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	24 unit	25.200.000	Balik Bukit	DAU	2 unit	20.231.200
2.15.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	-	Balik Bukit	DAU	0 Unit	-



X XX 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	Unit	25.200.000	Balik Bukit	DAU	2	Unit	20.231.200
X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	28.826.000	Balik Bukit	DAU	2	laporan	52.374.850
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14	laporan	67.610.000	Balik Bukit	DAU	13	laporan	156.805.110
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	99.257.600	Balik Bukit	DAU	4	laporan	291.184.334
X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	28.826.000	Balik Bukit	DAU	2	laporan	52.374.850
X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14	laporan	67.610.000	Balik Bukit	DAU	13	laporan	156.805.110
X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	99.257.600	Balik Bukit	DAU	4	laporan	291.184.334
X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	16	0	378.021.600	Balik Bukit	DAU	23	0	440.244.522



X XX 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	unit	112.600.000	Balik Bukit	DAU	6	unit	153.644.355
X XX 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	unit	-	Balik Bukit	DAU	1	unit	1.100.000
X XX 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	unit	-	Balik Bukit	DAU	4	unit	1.210.000
X XX 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	13.485.000	Balik Bukit	DAU	8	unit	19.831.900
X XX 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	251.936.600	Balik Bukit	DAU	4	unit	264.458.267



2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	12	%	1.407.263.330	Lampung Barat	DAU	12	%	2.010.301.378
		Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	3	%		Lampung Barat		3	%	
		Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	96	%		Lampung Barat		96	%	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	105	Unit	310.758.000	Lampung Barat	DAU	7	Unit	447.885.498
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	Unit	-	Lampung Barat	DAU	3	Unit	84.700.000
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	75	Unit	31.704.000	Lampung Barat	DAU	7	Unit	39.500.000
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Unit	66.953.000	Lampung Barat	DAU	3	Unit	-
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	105	Unit	310.758.000	Lampung Barat	DAU	7	Unit	447.885.498
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	Unit	-	Lampung Barat	DAU	3	Unit	84.700.000



2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	75	Unit	31.704.000	Lampung Barat	DAU	7	Unit	39.500.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	-	Unit	-	Lampung Barat	DAU	-	Unit	-
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Orang	28.500.000	Lampung Barat	DAU	2	Orang	-
		Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	12.563.050	Lampung Barat	DAU	2	Unit	45.000.000
2.15.02.2.03.07	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Revitalisasi	0	Unit	-	Lampung Barat	DAU	0	Unit	-
2.15.02.2.03.10	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	28.500.000	Lampung Barat	DAU	2	Orang	-
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	12.563.050	Lampung Barat	DAU	2	Unit	45.000.000



2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	Dokumen	-	Lampung Barat	DAU	1	Dokumen	45.500.000
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	115.154.000	Lampung Barat	DAU	1	Laporan	203.808.044
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	Dokumen	-	Lampung Barat	DAU	1	Dokumen	45.500.000
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	115.154.000	Lampung Barat	DAU	1	Laporan	203.808.044



2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	Unit	604.232.280	Lampung Barat	DAU	1	Unit	401.130.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	Orang	-	Lampung Barat	DAU	-	Orang	-
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-	Unit	-	Lampung Barat	DAU	1.200	Unit	149.720.000
		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	Dokumen	-	Lampung Barat	DAU	2	Dokumen	82.830.000
		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	Laporan	-	Lampung Barat	DAU	2	Laporan	60.500.000
		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2	Laporan	33.346.000	Lampung Barat	DAU	2	Laporan	102.850.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	Unit	85.590.000	Lampung Barat	DAU	7	Unit	54.450.000



		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	Lapaoran		-	Lampung Barat	DAU	1	Lapaoran	24.200.000
		Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	Laporan		-	Lampung Barat	DAU	-	Laporan	-
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	Unit	604.232.280		Lampung Barat	DAU	1	Unit	401.130.000
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	Orang		-	Lampung Barat	DAU	0	Orang	-
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0	Unit		-	Lampung Barat	DAU	1200	Unit	149.720.000
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0	Dokumen		-	Lampung Barat	DAU	2	Dokumen	82.830.000
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Laporan		-	Lampung Barat	DAU	2	Laporan	60.500.000
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2	Laporan	33.346.000		Lampung Barat	DAU	2	Laporan	102.850.000



2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	Unit	85.590.000	Lampung Barat	DAU	7	Unit	54.450.000
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Lapaoran	-	Lampung Barat	DAU	1	Lapaoran	24.200.000
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Laporan	-	Lampung Barat	DAU	0	Laporan	-
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	100	%	162.786.000	Lampung Barat	DAU	-	Dokumen	167.082.936
2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	20.124.000	Lampung Barat	DAU	1	Laporan	23.493.940
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	Laporan	15.614.000	Lampung Barat	DAU	2	Laporan	33.978.500



2.15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	10	Unit	37.700.000	Lampung Barat	DAU	1	Unit	16.714.496
2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	Laporan	89.348.000	Lampung Barat	DAU	3	Laporan	92.896.000
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	-	Dokumen	-	Lampung Barat	DAU	-	Dokumen	-
		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	Orang	-	Lampung Barat	DAU	1	Orang	24.200.000
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	Laporan	-	Lampung Barat	DAU	1	Laporan	48.400.000
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	Laporan	-	Lampung Barat	DAU	-	Laporan	-
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0	Dokumen	-	Lampung Barat	DAU	0	Dokumen	-



2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0	Orang	-	Lampung Barat	DAU	1	Orang	24.200.000
2.15.02.2.07.06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	Laporan	-	Lampung Barat	DAU	1	Laporan	48.400.000
2.15.02.2.07.07	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	Laporan	-	Lampung Barat	DAU	0	Laporan	-
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	22.630.000	Lampung Barat	DAU	1	Dokumen	28.544.900
2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	22.630.000	Lampung Barat	DAU	1	Dokumen	28.544.900
2.15.03	PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	10	%	25.953.400	Lampung Barat	DAU	10	%	127.811.300
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	-	Unit	-	Lampung Barat	DAU	1	Unit	99.000.000



	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	-	Unit	-	Lampung Barat	DAU	-	Unit	-
		Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	2	Unit	25.953.400	Lampung Barat	DAU	3	Unit	28.811.300
2.15.03.2.13.05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	0	Unit	-	Lampung Barat	DAU	1	Unit	99.000.000
2.15.03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau Yang Di Pembangunan	0	Unit	-	Lampung Barat	DAU	0	Unit	-
2.15.03.2.13.07	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	2	Unit	25.953.400	Lampung Barat	DAU	3	Unit	28.811.300
					4.863.120.830					7.198.206.566



BAB V

PENUTUP

Rencana Awal Rerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja (Renja) Tahun Ketiga sebagai penjabaran RPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan mempertimbangkan urusan dan kewenangan bidang perhubungan serta kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan untuk kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) berikutnya, dan kepada pihak-pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Semoga Allah SWT meridhoi setiap amal kebaikan kita, aamiin.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat



REZA MAHENDRA, SH.M.H.

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008